

Konsep Permukiman Kembali pada Kawasan Kumuh Sungai Banger, Probolinggo

Nareswaranandya⁽¹⁾, Annisa Nur Ramadhani⁽¹⁾

¹Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, email: nareswaranandya@gmail.com

Abstract

The Banger River has been converted into a high-density slum dwelling. Most of the slum dwellings are permanent buildings located above the river and around the river border, resulting in experiencing a significant decline in the quality of its facilities and infrastructure. The condition of buildings and infrastructure supporting slums in the Banger river area is analyzed with seven slum parameters according to the Ministry of Public Works Regulation No. 2 of 2016 Article 4 paragraph 2. The typology based on the geographical location categorized the Banger River area as slum dwellings on the edge of water bodies. The formulation of the problem that will be discussed in this study is to identify the physical and non-physical problems that affect the function of the Banger River area. The purpose of this study is to develop a pattern of slum settlements renewal that can optimize the potential and answer the problems that exist in the area. The research method chosen was descriptive qualitative with literature studies and field surveys. The results showed that the appropriate treatment concept was resettlement so that it could optimize the potential and could answer the problems of the seven slum parameters.

Keywords: *Slum Parameter, Urban Renewal, Slum Area*

Abstrak

Sungai Banger telah beralih fungsi menjadi hunian kumuh dengan kepadatan yang tinggi. Sebagian besar hunian kumuh tersebut merupakan bangunan permanen yang berada di atas sungai dan di atas sempadan sungai, sehingga mengakibatkan Sungai Banger mengalami penurunan kualitas sarana dan prasarana yang signifikan. Kondisi bangunan dan infrastruktur pendukung hunian kumuh di kawasan sungai Banger dianalisa dengan tujuh parameter kekumuhan menurut Permen PU No 2 Th 2016 Pasal 4 ayat 2. Berdasarkan letak lokasi secara geografis, kawasan Sungai Banger termasuk dalam tipologi hunian kumuh di tepi badan air. Rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan fisik dan non fisik yang mempengaruhi fungsi kawasan bantaran Sungai/Kali Banger. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun pola penanganan pada permukiman kumuh di tepi air yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab permasalahan yang ada di kawasan bantaran Sungai Banger. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif dengan dengan studi literatur dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penanganan yang tepat adalah pemukiman kembali sehingga dapat mengoptimalkan potensi serta dapat menjawab permasalahan dari tujuh parameter kekumuhan tersebut.

Kata-kunci : *Parameter Kekumuhan, Pemukiman Kembali, Kampung Kumuh*

1. Pendahuluan

Sungai Banger merupakan salah satu dari enam sungai yang mengalir dari arah selatan ke utara di wilayah kabupaten Probolinggo. Pada tahun 1970-an, sungai dengan panjang 6.40 km ini masih selebar ± 5 meter dan menjadi jalur perdagangan para perahu nelayan untuk mengangkut ikan. Namun karena pertumbuhan penduduk yang pesat, berdasarkan Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor No 74 Tahun 2019 (Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor No 74 Tahun 2019 , 2019) tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Probolinggo, sungai Banger telah beralih fungsi menjadi permukiman kumuh dengan kepadatan yang tinggi. Permukiman tersebut merupakan permukiman liar yang memakan garis sempadan sungai, sehingga Sungai Banger mengalami penurunan kualitas sarana dan prasarana yang signifikan.

Berdasarkan letak lokasi secara geografis, permukiman kumuh yang berada di tepi badan air (pantai, sungai, waduk, danau, dan sebagainya) masuk ke dalam tipologi permukiman kumuh di tepi air (*PERMEN PUPR RI No. 02, 2016*). Sehingga untuk meningkatkan kualitas terhadap permukiman kumuh, perlu penanganan penataan kawasan Sungai Banger secara komprehensif dan terpadu serta mensinergikan dengan Rencana Pembangunan Kota Probolinggo dalam bentuk dokumen perencanaan

Kali banger. Mengatasi permukiman kumuh tepi laut ini memerlukan pertimbangan daya dukung tanah tepi laut, pasang surut, dan sifat konservasi air dan tanah.

Rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan fisik dan non fisik yang mempengaruhi fungsi kawasan bantaran Sungai/Kali Banger. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun pola penanganan pada permukiman kumuh di tepi air yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab permasalahan yang ada di kawasan bantaran Sungai Banger.

2. Tinjauan Pustaka

Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan area hunian tidak layak huni dengan tingkat kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi serta kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standart (Dwijito Putro, n.d.; Ramadhani, 2021). Terdapat tujuh parameter kekumuhan menurut Permen PU No 2 Th 2016 Pasal 4 ayat (2) (*PERMEN PUPR RI No. 02, 2016*), antara lain: (a) aspek bangunan: tingkat kepadatan yang tinggi, ketidaksesuaian tata ruang, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat; (b) kualitas jalan lingkungan yang buruk dan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, (c) kondisi drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, timbul genangan, serta drainase tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, (d) akses air minum yang buruk dan tidak sesuai standar; (e) pengelolaan limbah tidak terpelihara serta kualitas konstruksi drainase buruk; (f) sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis; serta (g) sarana dan prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Pola penanganan dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan dari assessment kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan (Rahayu et al., n.d.; Ramadhani, n.d.). Apabila lahan tersebut memiliki tingkat kekumuhan yang beragam dengan status lahan yang ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu permukiman Kembali (urban renewal) yang bertujuan dalam mewujudkan permukiman layak huni untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan masyarakat (Sekatia, n.d.). Pemukiman kembali merupakan kegiatan pemindahan penduduk dari suatu area ke area lain secara kolektif/individu yang difasilitasi pemerintah (Suwartapradja, n.d.). Penduduk yang pindah harus disertai dengan penciptaan lapangan kerja supaya tidak menjadi ancaman (Prasetyo, 1994).

Pola Penanganan pada Hunian Kumuh menurut Tipologinya

Tipologi permukiman kumuh adalah pengelompokan area kumuh sesuai dengan kategorisasi letak lokasi geografis. Salah satu contohnya adalah tipologi permukiman kumuh di tepi air dimana merupakan area permukiman kumuh yang letak geografisnya berada di tepi badan air, sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya (Aulia et al., 2019).



Gambar 1. Tipologi Perumahan / Permukiman Kumuh di Tepi Air (*Sumber: Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 2014*)

Pola-pola penanganan permukiman kumuh diatur mempertimbangkan aspek tipologi atau letak geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) Permen PU No 2 Tahun 2016. Dalam hal ini termasuk tipologi permukiman kumuh tepi air, dimana meliputi aspek sebagai berikut: (a) bangunan dan lingkungan, dimana lokasi area hunian pada area waterfront sungai yang berakibat pada intensitas pemanfaatan ruang bangunan, adaptasi bangunan sesuai standart atau ketentuan yg berlaku dan memanfaatkan material yang memiliki ketahanan terhadap daya rusak air; (b) jalan lingkungan, yaitu pondasi jalan dalam sisi perairan memakai sistem cerucuk, sedangkan dalam sisi daratan memakai sistem konvensional yakni memakai material infrastruktur yg memiliki ketahanan terhadap daya rusak air, memakai batu bronjong dalam jalan yg berbatasan dengan perairan; (3) drainase, memakai sistem

drainase lokal yg memiliki ketahanan terhadap daya rusak air; (4) penyediaan air minum, yakni penyediaan air bersih sesuai standart dengan sumber setempat, sistem distribusi perpipaan dimana pipa sambungan dipasang melekat dalam konstruksi jalan/drainase pada atas air (dalam sisi perairan); (5) pengelolaan air limbah setempat yang ditempatkan secara floating memanfaatkan material yg punya ketahanan terhadap daya rusak air; apabila system berada pengelolaan air limbah berada di bawah tanah dapat memanfaatkan material yang sesuai dengan daya dukung tanah, unit pemipaan apabila memakai sistem pengolahan air limbah terpusat maka dalam sisi perairan pipa sambungan dipasang melekat dalam konstruksi jalan/drainase diatas air; (6) pengelolaan persampahan, yakni unit pengumpulan sampah misalnya Tempat Pembuangan Sampah dapat ditempatkan pada atas air, sedangkan unit pengangkutan sampah bisa memakai moda transportasi air; (7) penanggulangan kebakaran, yaitu pasokan air darurat kebakaran memanfaatkan sumber air setempat.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif yaitu meneliti obyek, kondisi, status kelompok manusia, peristiwa, atau sistem pemikiran dengan tujuan membuat deskriptif sistematis, aktual, dan akurat terkait data yang diteliti (Nazir, 2014; Nareswaranandya et al., 2021). Tujuan penggunaan metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2022). Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 2 Th 2016 pasal 15 ayat (4), penyusunan konsep penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui enam tahapan, antara lain persiapan, observasi lapangan, identifikasi data dan fakta, analisa data, penyusunan konsep perbaikan permukiman kumuh, dan penyusunan rencana realisasi penanganan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi literatur. Pemilihan responden menggunakan purpose sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan penelitian (Arikunto, 2006). Responden yang dituju antara lain Pemerintah Kota Probolinggo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, Kepala Wilayah Kecamatan Mayangan, serta beberapa penduduk area sungai Banger. Penyusunan survei mencakup pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan penelitian. Dalam tahapan survey ini peneliti mengumpulkan data terkait kondisi kawasan dan kondisi sosio demografi masyarakat. Selanjutnya, pada tahap penyusunan data dan fakta dilakukan koordinasi internal terkait profil permukiman kumuh yang ada di kawasan sungai Banger sesuai dengan tata guna lahan peta sebaran permukiman kumuh perkotaan. Setelah itu, tahapan akhir merupakan penyusunan konsep dan rencana perbaikan permukiman kumuh meliputi aspek lingkungan, bangunan, drainase, sumber air, pengelolaan limbah, persampahan, dan penanggulangan kebakaran.

4. Analisa Kondisi dan Konsep Penanganan Wilayah Perencanaan

Analisa Kondisi Wilayah Perencanaan

Kondisi bangunan dan infrastruktur pendukung untuk tipologi perumahan dan permukiman kumuh di tepi air dianalisa dengan tujuh parameter kekumuhan menurut Permen PU No 2 Th 2016 Pasal 4 ayat (2) (*PERMEN PUPR RI No. 02, 2016*):

1. Kondisi bangunan dan lingkungan, bangunan rumah rata-rata berada di atas sungai dan di atas sempadan sungai dengan arah hadap membelakangi sungai. Sebagian besar rumah merupakan bangunan permanen menggunakan material batu bata dan tap asbes atau seng. Sebagian kecil merupakan bangunan non permanen yang menggunakan material multiplek dan bambu.



2.a



2.b



2.c

Gambar 2. (a) Bangunan permanen di atas sungai, **(b)** Bangunan semi permanen di garis sempadan sungai, **(c)** Rumah dengan material dinding multiplek. (*Sumber: Dokumen pribadi, 2019*)

2. Jalan lingkungan, menggunakan material paving dan beton, dengan lebar rata-rata 1 s/d 2 meter. Pada umumnya sirkulasi tersebut merupakan gang sempit yang timbul akibat hunian tidak terencana yang muncul dibelakang rumah warga.



3.a



3.b

Gambar 3. (a) Jalan Lingkungan di kawasan kumuh sungai Banger **(b)** Area lingkungan kawasan kumuh sungai Banger (Sumber: Dokumen pribadi, 2019)

3. Drainase, kondisi drainase lingkungan langsung mengarah ke sungai Banger, tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, timbul genangan, serta tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
4. Penyediaan air minum, sebagian besar menggunakan PDAM, namun beberapa menggunakan sumur sebagai sumber air minum. Karena lokasinya yang berdekatan dengan Sungai Banger yang tercemar limbah, maka sumber air permukaan tanah tidak jernih.
5. Pengelolaan air limbah, terdapat WC helikopter yang dibangun warga di pinggir sungai dan sebagian besar pembuangan air kotor rumah tangga langsung ke sungai



4.a



4.b

Gambar 4. (a) Jamban atau WC sebagai area MCK di kawasan kumuh sungai Banger **(b)** Pengelolaan air limbah di kawasan kumuh sungai Banger (Sumber: Dokumen pribadi, 2019)

6. Pengelolaan persampahan, unit pengumpulan sampah seperti TPS berada di Jalan Ahmad Yani. Unit pengangkutan sampah menggunakan container. Namun sebagian besar warga masih membuang sampah ke Sungai Banger.



5.a



5.b

Gambar 5. (a) Pengelolaan persampahan di kawasan kumuh sungai Banger **(b)** Peta Pengelolaan air limbah di kawasan kumuh sungai Banger (Sumber: Dokumen pribadi, 2019)

7. Kebakaran, tidak ada hidran untuk pasokan sumber air apabila terjadi kebakaran. Kondisi sungai pun keruh dan kotor, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pasokan air. Kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat melewati gang/jalan permukiman karena sempit.

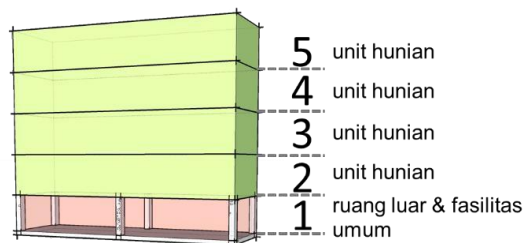
Konsep Penanganan Wilayah Perencanaan

Menindaklanjuti hasil analisa bangunan dan infrastruktur pendukung untuk tipologi perumahan dan permukiman kumuh di tepi air, konsep penanganan yang dipilih adalah transformasi hunian horizontal menjadi hunian vertikal (rusunawa). Bangunan di atas sungai dan sempadan Sungai Banger dibongkar untuk dibangun kembali secara vertikal (rusunawa) di lokasi yang sama oleh pemerintah. Rusunawa harus mewadahi aktivitas masyarakat di kampung dan dapat mensejahterakan warga dalam menunjang ekonomi secara mandiri. Pemilihan lokasi pembangunan rusunawa didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain: (a) luas lahan yang cukup untuk mewadahi aktifitas dan fasilitas kampung; (b) aksesibilitas yang baik didukung dengan adanya jalan raya untuk mengakses rusunawa; (c) kondisi demografi, yaitu kepadatan penduduk dan tingkat pendapatan yang rendah. Semakin dekat lokasi rusunawa dengan rumah asal target penduduk, maka semakin tepat sasaran. Sesuai dengan kriteria-kriteria di atas, lokasi yang dianggap berpotensi untuk dibangun rusunawa (Gambar 5.5) adalah Jl.Irama Kelurahan Jati.



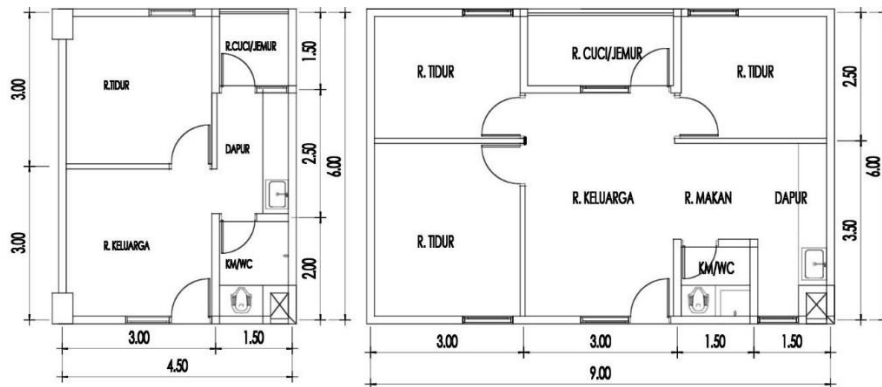
Gambar 6. Rencana Lokasi Rusunawa di kawasan kumuh Sungai Banger
(Sumber: Dokumen pribadi, 2022)

1. Organisasi ruang, secara vertikal, organisasi ruang rusunawa pada lantai 1 difungsikan sebagai ruang luar (jalan lingkungan, taman, kebun sayur, kebun TOGA) dan fasilitas penunjang (ruang usaha bersama, balai serbaguna, mushola, kantor pengelola, dll). Ruang usaha bersama yang mewadahi pekerjaan mayoritas penduduk asal, yaitu pedagang. Sedangkan unit-unit hunian diposisikan pada lantai 2 – 5 (Gambar 5.6).



Gambar 7. Konsep organisasi vertikal desain rusunawa
(Sumber: Dokumen pribadi, 2022)

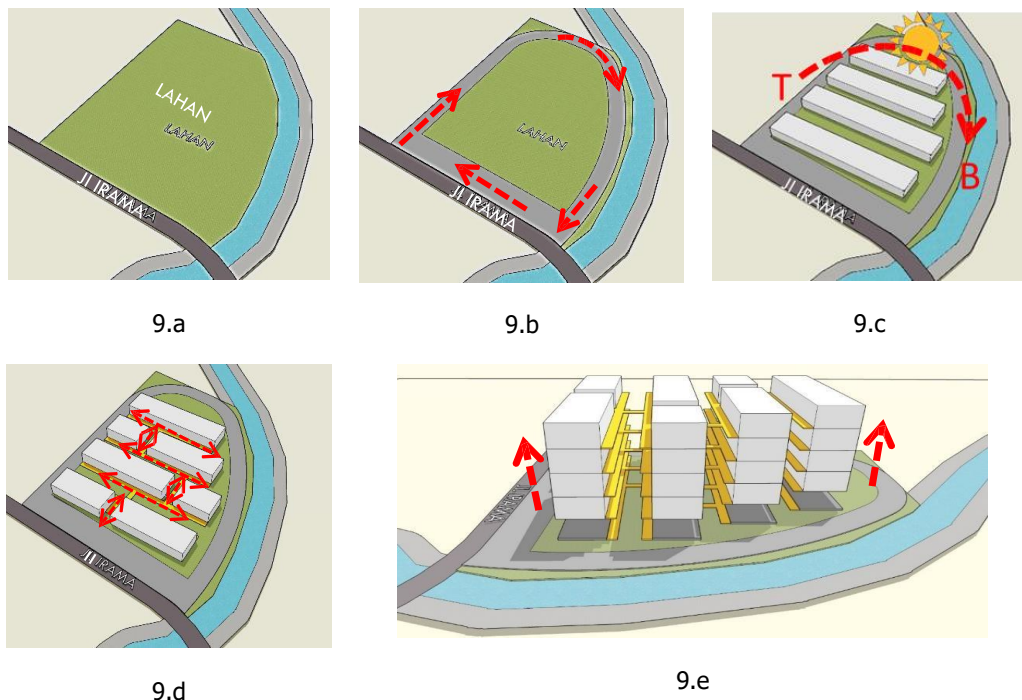
Untuk mewadahi kebutuhan ruang penduduk yang beragam, unit hunian dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe kecil 4,5x9 m (luas 27 m²) dan menengah 6x9 m (luas 54 m²). Seluruh ruangan diposisikan memiliki jendela yang berhubungan langsung dengan ruang luar untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Masing-masing unit hunian terdiri dari ruang keluarga, ruang tidur, KM/WC, dapur, dan ruang cuci jemur.



Gambar 8. Konsep desain denah unit rusunawa

(Sumber: Dokumen pribadi, 2022)

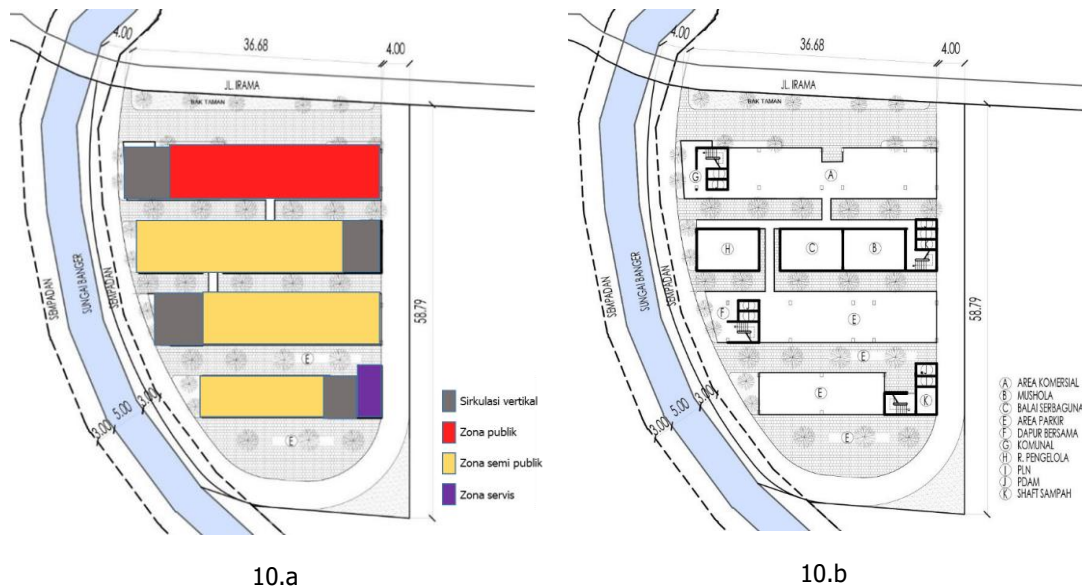
2. Pola Tataan Massa, perancangan Rusunawa harus memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Untuk memudahkan operasi pemadaman, harus disediakan jalur akses mobil PMK selebar 4 m dengan radius putaran minimum 9,5 m (gambar 9.b). Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran, gedung dengan ketinggian 8 – 14 m harus memiliki jarak minimum 3-6 m (PERMEN PU NO 26/PRT/M/2008). Perancangan Rusunawa harus mampu memberikan kenyamanan thermal (memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami). Untuk menciptakan kenyamanan thermal pada rusunawa, seluruh massa bangunan berorientasi ke arah barat-timur (sesuai garis edar matahari), sehingga bidang yang terpapar sinar matahari paling banyak adalah bidang utara-selatan (gambar 9.c). Kemudian massa bangunan dipotong hingga maksimal proporsi lebar dan panjang adalah 1:3 serta pada bagian tengah massa diberikan void yang berfungsi sebagai taman untuk memaksimalkan ventilasi silang (gambar 9.d). Seluruh massa bangunan tersebut diberi sirkulasi penghubung berupa koridor gang pada tiap lantai untuk memudahkan interaksi sosial antar warga. Massa bangunan kemudian disusun secara vertikal dan diangkat untuk memaksimalkan lantai 1 menjadi ruang luar dan fasilitas permukiman (gambar 9.e).



Gambar 9. Konsep desain unit rusunawa

(Sumber: Dokumen pribadi, 2022)

Secara horizontal, area komersial diletakkan pada zona publik, fasilitas bersama diletakkan pada zona semi publik, sedangkan area servis diletakkan pada zona privat (Gambar 10.a). Pada zona publik terdiri dari ruang usaha bersama untuk lapangan kerja penduduk lama, zona semi publik terdiri dari fasilitas bersama yaitu mushola, balai serbaguna, ruang pengelola, dan area parkir, sedangkan pada zona servis terdiri dari ruang ME (PLN, PDAM, dan shaft sampah).



Gambar 10. Pembagian ruang secara horizontal, a. pembagian zona, b. pembagian ruang pada lantai

1

(Sumber: Dokumen pribadi, 2022)

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisa bangunan dan infrastruktur pendukung untuk tipologi perumahan dan permukiman kumuh di tepi air, maka konsep penanganan yang dipilih adalah transformasi hunian horizontal menjadi hunian vertikal (rusunawa) yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab permasalahan dari parameter kekumuhan Permen PU No 2 Th 2016 Pasal 4 ayat (2). Bangunan warga yang terletak di atas sungai dan di sempadan Sungai Banger direlokasi di area yang sama dan memenuhi kriteria pemilihan lokasi, yaitu luas lahan yang cukup, akses yang strategis, tetap berada pada area rumah asal target penduduk. Pada perencanaan organisasi ruang secara vertikal, pada lantai 1 difungsikan sebagai ruang luar dan fasilitas penunjang, salah satunya adalah ruang usaha bersama yang mewadahi pekerjaan mayoritas penduduk asal, yaitu pedagang. Sedangkan unit hunian diposisikan pada lantai 2-5. Pada perencanaan pola tatanan massa dan lingkungan, pada keliling tapak disediakan jalur akses servis dan PMK, massa bangunan disusun secara vertikal, berorientasi barat timur, dengan proporsi panjang 1:3, dan pemberian void untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami. Untuk mewadahi kebutuhan interaksi antar penduduk, antar massa bangunan diberikan koridor sebagai penghubung sekaligus berfungsi sebagai area komunal. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah merancang bentuk dan fasad bangunan rusunawa yang dapat mengakomodasi kebutuhan penduduk sesuai dengan penerapan arsitektur perilaku.

6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya dan Pemerintah Kota Probolinggo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan atas kontribusinya sebagai pemberi dana penelitian.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Rineka Cipta.

- Aulia, D., Marpaung, B., & Zahrah, W. (2019). Typology of livable waterfront settlement and how to manage the community. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 505, 012136. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/505/1/012136>
- Dwijo Putro, J. (n.d.). *PENATAAN KAWASAN KUMUH PINGGIRAN SUNGAI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA*.
- Nareswaranandya, Laksono, S. H., Ramadhani, A. N., Budianto, A., Komara, I., & Syafiarti, A. I. D. (2021). The design concept of bamboo in micro housing as a sustainable self-building material. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1010(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1010/1/012026>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (9th ed.). Ghalia Indonesia. <http://perpus.bandungkab.go.id/opac/detail-opac?id=4242>
- Nur Ramadhani, A., & Oktafiana, B. (2021). *KAMPUNG VERTIKAL SEBAGAI STRATEGI URBAN RENEWAL DI KAMPUNG LUMUMBA, SURABAYA*.
- Prasetyo, S. Y. A. (1994). *Seputar Kedung Ombo*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=1602
- Rahayu, I., Jaharuddin, W., Teknik Arsitektur, J., Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Jl Sultan Alauddin No, F., Gowa, K., Selatan, S., Perintis Kemerdekaan, J. K., & Makassar, K. (n.d.). *IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI SEKITAR TAMAN MACCINI SOMBALA KOTA MAKASSAR*.
- PERMEN PUPR RI No. 02, (2016).
- Ramadhani, A. N. (n.d.). *55 Annisa Nur Ramadhani, Community Based Tourism dalam Pengembangan Kampung Nelayan Kedung Cowek di Surabaya COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG NELAYAN KEDUNG COWEK DI SURABAYA*.
- Sekatia, A. (n.d.). *KAJIAN PERMUKIMAN KUMUH DAN NELAYAN TAMBAK LOROK SEMARANG Studi Kasus Partisipasi Masyarakat*.
- Sukmadinata, N. S. (2022). *Metode penelitian pendidikan / Nana Syaodih*. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22622>
- Suwartapradja, O. S. (n.d.). *MODEL ALTERNATIF PEMUKIMAN KEMBALI (RESETTLEMENT) PENDUDUK YANG TERKENA PEMBANGUNAN*. 32. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/MODEL-ALTERNATIF-PEMUKIMAN-KEMBALI-1-1.pdf>
- Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor No 74 Tahun 2019 , (2019).